

Proposal Penelitian

ASPIRASI DAERAH BIDANG KOMINFO (Kesiapan Daerah Menuju Jawa Barat *Smart Province*)

Tim Peneliti

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung,
Jl. Pajajaran No.88, Bandung, Telp. (022) 6017493, Fax. (022) 6021740

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu dampak dari globalisasi telah menyentuh seluruh aspek penting kehidupan manusia termasuk seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Dampak dari perkembangan tersebut sangat dirasakan oleh instansi pemerintah terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi (Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi dalam Salsabila, 2015). Secara administratif dan geografis, wilayah-wilayah pemerintahan yang ada, memiliki kondisi dan permasalahan yang beragam, di antaranya transportasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, energi, dan sebagainya.

Menghadapi kondisi yang ada, banyak wilayah-wilayah yang merasa perlu menyediakan respon yang tanggap terhadap kondisi yang ada serta memahami kebutuhan di wilayah tersebut dengan mengoptimasi penggunaan TIK. Penggunaan TIK tidak hanya ditujukan untuk efisiensi pada proses bisnis dan meningkatkan pelayanan publik. Lebih jauh dari itu, pada akhirnya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi wilayah seperti ini mengarah kepada *smart region* dengan pengembangan dimensi lainnya, di antaranya *smart government*, *smart transportation*, *smart health*, *smart energy*, *smart environment*, *smart surveillance*, *smart people*, dan lainnya (Badan Litbang SDM, Kominfo, 2012), hal ini juga mendorong wilayah-wilayah di Indonesia mengembangkan *smart region*. Pemerintah sebagai *enabler* menjadi isu strategis untuk mewujudkan wilayah yang *smart*.

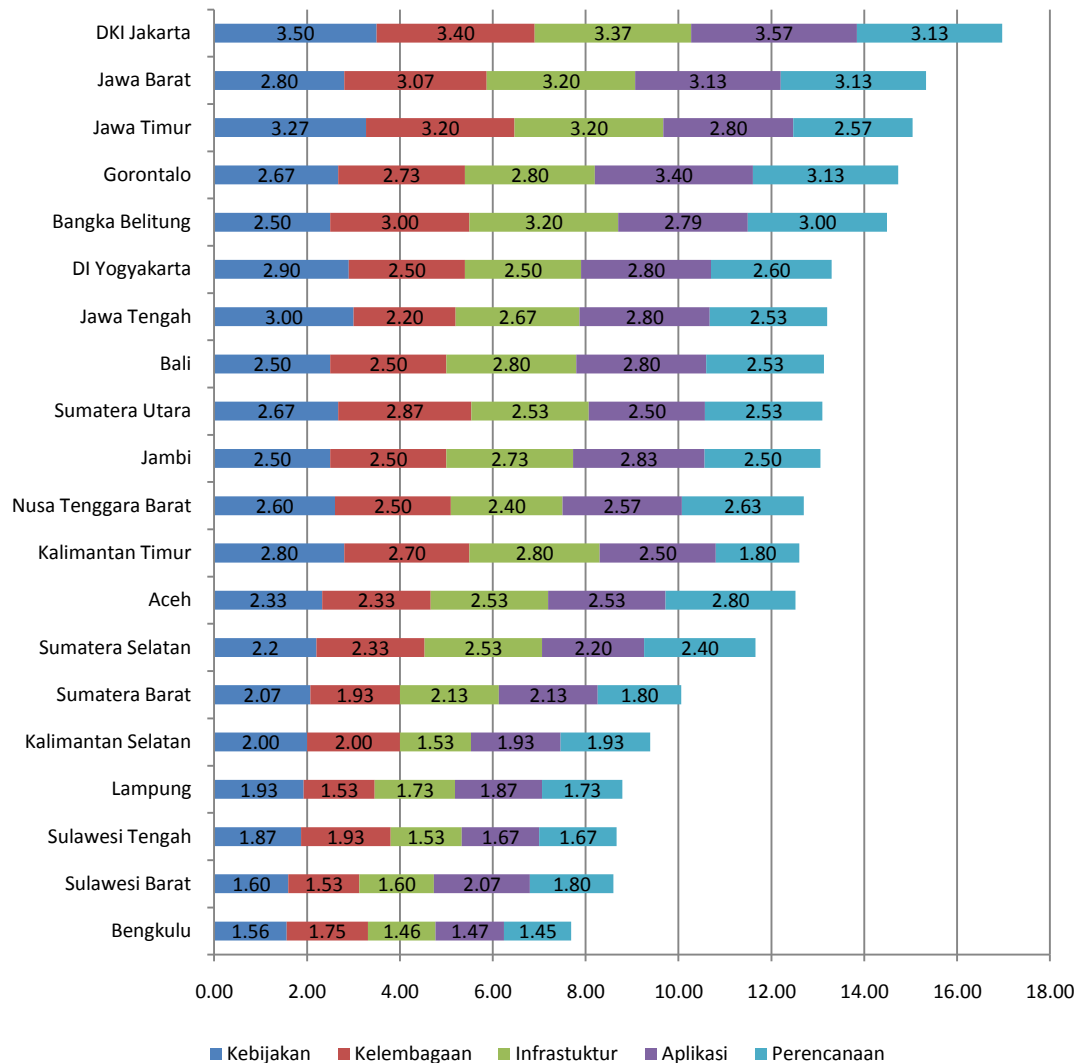
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini terus melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang *smart* yang pada akhirnya adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel, merupakan

harapan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Penyempurnaan terhadap sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan publik mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan harapan tersebut penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasinya. Program *Jabar Cyber Province* yang diluncurkan pada tahun 2008 menjadi salah satu upaya dalam memberikan layanan kepada publik.

Jabar Cyber Province merupakan program unggulan dan merupakan langkah awal menuju Program *Jabar Smart Province*. Program *Jabar Cyber Province* mengintegrasikan inisiatif-inisiatif TIK di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya; *Pertama*, menghubungkan secara digital semua Instansi Pemerintah Provinsi, dengan harapan aparaturnya dapat bekerja dengan mudah, cepat, tepat, efektif, hemat, sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik; *Kedua*, melakukan transformasi digital atas proses-proses bisnis Pemerintah Provinsi; dan *Ketiga*, memperkenalkan *e-literacy* dan fasilitas TIK yang terjangkau untuk masyarakat, dengan bantuan TIK, dibayangkan masyarakat akan hidup lebih mudah, misalnya, dalam hal kesehatan, dengan cepat mereka dapat memperoleh seperti kemudahan mendapat informasi, kemudahan menyelesaikan berbagai urusan, murah dalam proses pembiayaan. Kemudian dalam hal perbankan, masyarakat dapat terbantu dengan kemudahan berbisnis dan bertransaksi, sehingga hidupnya terbantu dalam hal kemudahan urusan (*e-Business*). Selain itu juga masyarakat agar dapat dicerdaskan pengetahuan dan wawasannya dengan kemudahan akses informasi (*e-Education*). Program tersebut juga merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan digital dan target mewujudkan masyarakat informasi di Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi implementasi pengembangan TIK di instansi pemerintah (*e-government*), Jawa Barat memiliki peringkat kedua secara nasional (Buku Putih TIK Kominfo, 2015) dengan rata-rata 3,06 (dalam melakukan pemeringkatan *e-government* ini digunakan skala 1 sampai dengan 4 dengan angka 1 menunjukkan penilaian sangat kurang, angka 2 diartikan mempunyai nilai kurang, angka 3 menunjukkan nilai yang baik, dan angka 4 dapat diartikan dengan baik sekali. Kriteria hasil pemeringkatan secara keseluruhan adalah jika rata-rata 5 dimensi yang diperoleh antara 3,6 sampai dengan 4 maka kategori yang disandang daerah tersebut adalah sangat baik, jika nilainya antara 2,6 sampai dengan 3,6 termasuk kategori baik, jika nilai rata-ratanya 1,6 sampai dengan 2,6 mendapat kategori kurang, dan untuk nilai antara 1 sampai dengan 1,6

termasuk kategori sangat kurang). Dilihat dari keseluruhan aspek yang dinilai, aspek kebijakan merupakan dimensi yang masih di bawah rata-rata dimensi lainnya.



Sumber: Buku Putih TIK Kominfo, 2015.

Gambar 1. PeGI Tingkat Provinsi

Perkembangan *Jabar Cyber Province* ini terus berlangsung dan dilanjutkan dengan target selanjutnya mewujudkan *Jabar Smart Province*. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan Program *Jabar Smart Province*, yang ditujukan untuk memberikan pelayanan berbasis digital kepada masyarakat sehingga program menjadi lebih efisien dan transparan, terutama di bidang

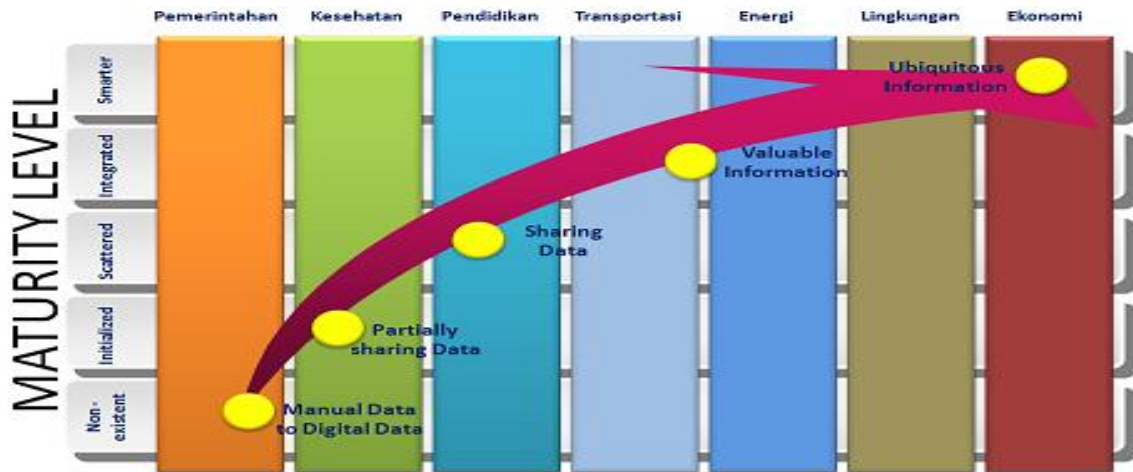
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni mengatakan, “Melalui *smart province*, Pemprov Jabar akan membentuk perilaku dan budaya masyarakat untuk menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi” (Abdurrahman, 2016). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Program *Jawa Barat Smart Province* merupakan penerapan *smart government* yang merupakan langkah selanjutnya dari penerapan *e-government*, yang dapat mendukung pembangunan *smart city* di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan

Jawa Barat *Smart Province* merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengembangkan *e-government* dan ke tingkat selanjutnya (*smart government*). Telah diketahui bahwa penerapan *e-government* menuju *smart government* di Pemerintah Jawa Barat mengakomodir *best practises* penerapan *smart city* di wilayah kota/kabupaten di wilayahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga terdapat perbedaan fokus dan pengembangan dimensi *smart government* atau *smart city* di masing-masing kota/kabupaten tersebut. Oleh karena itu, konsep penerapan *smart government* melalui *Jabar Smart Province* perlu diurai kembali sesuai dengan dimensi-dimensi *smart government* yang telah diterapkan di berbagai wilayah di Jawa Barat, sehingga dapat dirumuskan kembali sebagai masukan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan penerapan *smart government* maupun *smart city* melalui Program *Jabar Smart Province*.

Untuk menuju *smart province* tidak hanya aspek *e-government* saja yang perlu menjadi perhatian, tetapi perlu diimplementasikan aspek lainnya. Sehingga kesiapan implementasi perlu diidentifikasi, mengacu pada kesiapan dapat dilihat dari tingkat kematangan *smart province* secara keseluruhan yang diukur mempertimbangkan layanan *smart province*, infrastruktur TIK *smart province*, dan tata kelola. Provinsi terdiri dari kota/kabupaten, sehingga kesiapan di *level* daerah menjadi perlu dipersiapkan menuju *smart province*.

Kesiapan ini dilihat dari tingkat kematangan layanan yang diadopsi dari model *smart city* dengan memandang kota/kabupaten sebagai unit pembentuk *smart province* (Provinsi terdiri dari kota/kabupaten, dipandang sebagai “city”) yang disusun terdiri dari 5 (lima) *level* yaitu:



Gambar 2. Maturity Level Smart City di Indonesia

- **Non-Existent.** Kota-kota pada tingkat kematangan ini adalah kota yang masih belum ada inisiasi untuk melakukan pengembangan *smart city*. Karakteristik dari pengembangan layanan TIK adalah masih tahap migrasi dari *manual data* menuju ke *digital data*.
- **Initialized.** Pada tingkat kematangan ini, pemerintah kota sudah melakukan inisitif untuk mengembangkan layanan *smart city* walaupun pengembangan masih dilakukan secara parsial. Karakteristik dari tingkat kematangan ini adalah adanya *sharing data* yang dilakukan secara parsial.
- **Scattered.** Kota-kota yang mempunyai komitmen penuh dalam mengembangkan layanan *smart city* walaupun pengembangan antar layanan masih dilakukan secara terpisah . Pada tingkat ini, inisiatif masih dilakukan oleh struktur departemen/dinas sebagai serangkaian proyek terpisah dengan dinas/departemen lain. Karakteristik dari tingkat kematangan ini adalah sudah mulai dilakukan sharing data.
- **Integrated.** Pada *level* kematangan ini, inisiatif terkoordinasi jauh lebih baik, mencari sinergi untuk peningkatan dan tata kelola portofolio proyek yang lebih kolaboratif. Pada tahap ini nilai yang disampaikan oleh inisiatif lebih besar. Karakteristik dari tingkat kematangan ini adalah sudah adanya *valuable information* yang merupakan hasil data analitis dari sharing data lintas dinas/departemen.
- **Smarter City.** Pada tahapan ini, inisiatif pengembangan *smart city* merupakan bagian dari *holistic master plan* yang dikelola oleh pemerintah kota yang berdedikasi, termasuk

warga dan bisnis. Pada *level* ini, layanan *smart city* dapat diakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

Tabel 1. Parameter *Smart City*

Domain	Sub Domain
Layanan	Jumlah layanan <i>smart city</i> Layanan publik <i>online</i> Integrasi layanan antar SKPD Pertukaran data antar aplikasi Layanan publik berbasis identitas tunggal Layanan menggunakan analitik <i>tools</i> seperti BI Transparansi informasi ke publik (<i>procurement</i> , anggaran dan pendapatan, bencana, dll) Pengguna layanan <i>smart city</i> Dukungan swasta
Infrastruktur	Jangkauan Akses (<i>Coverage</i>) Kapasitas <i>Bandwidth</i> Jaringan Akses Persentase pengguna internet Jaringan antar SKPD DC - DRC Dukungan swasta
Tata kelola	Organisasi TIK Kebijakan dan Regulasi Masterplan TIK SDM TIK Pendanaan Operasional

Unit Analisis : Dinas Kota/Kabupaten

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tentang kesiapan daerah mengenai Program *Jawa Barat Smart province*.

LANDASAN TEORETIS

Konsep *Smart Government*

IBM dalam Nam and Pardo (2011) menyampaikan bahwa *smart government* merupakan salah satu komponen *smart city*. Pemerintah yang lebih “pintar” tidak hanya membuat regulasi tentang keluaran sistem sosial ekonomi. Pemerintah pintar menginterkoneksi secara dinamis dengan warga, komunitas, dan kalangan usaha secara *real time* untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan kemajuan daerah. Pemerintah yang lebih pintar berkolaborasi dengan seluruh bagian dan dengan komunitas agar lebih transparan dan akuntabel, mengelola sumber daya secara efektif, dan menyediakan akses informasi kepada warga masyarakat mengenai kebijakan yang berdampak untuk kehidupan masyarakat. Pemerintah pintar mengintegrasikan pelayanan, membangun kantor yang mendukung beberapa layanan, dan menempatkan transaksi yang sangat dibutuhkan di *web*. Di tingkat dasar, *smart government* berarti membuat operasional dan layanan lebih *citizen-centric* (berpusat pada warga). (Nam and Pardo, 2011)

Menurut Gil-Garcia et. al. dalam Anthopoulos and Reddick (2016), menyimpulkan bahwa beberapa definisi *smart city* menggambarkan fenomena yang sama, yaitu pemanfaatan infrastruktur dan layanan berbasis TIK untuk meningkatkan cara hidup perkotaan (urban), serta memiliki beberapa komponen dan sub-elemen yang terdiri dari: (1) Teknologi dan Data (TIK, data, dan informasi). (2) Lingkungan fisik (lingkungan alam dan infrastruktur perkotaan). (3) Masyarakat (ekonomi berbasis pengetahuan, SDM, dan tata kelola pemerintahan). (4) Pemerintahan (penataan institusi, administrasi/pemerintah kota, dan pelayanan publik). Oleh karena itu, pemerintahan merupakan salah satu komponen *smart city* yang memiliki sub-elemen: penataan institusi, pemerintahan kota, dan pelayanan publik. Terkait hubungan antara *smart city* dan tata kelola pemerintahan, Anthopoulos and Reddick dalam Anthopoulos and Reddick (2016) menyatakan bahwa *smart city* berhubungan dengan inovasi yang kebanyakan walaupun tidak harus berbasis TIK, dapat meningkatkan cara hidup perkotaan (urban) di aspek: manusia, tata kelola pemerintahan, ekonomi, mobilitas, lingkungan dan cara hidup.

Selanjutnya, Anthopoulos and Reddick (2016) menggunakan metodologi riset kajian literatur dengan kata kunci “*smart*” dan “*government*”, untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara *smart government* dan *smart city*, didapatkan beberapa pengertian seperti yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Definisi Relatif *Smart Government* (Anthopoulos and Reddick, 2016)

Istilah	Definisi	Sumber Kutipan
<i>Smart Government</i>	Penggunaan yang luas teknologi pintar (<i>smart technology</i>) untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan.	Cellary; Mellouli
	Penerapan suatu kumpulan proses bisnis berbasis TIK yang memungkinkan aliran informasi lintas pemerintah dan penyediaan layanan yang berkualitas tinggi.	Rubel
	Peran strategis pemerintah dalam masyarakat dan pembangunan kapasitas manajerial yang dapat meningkatkan efektifitas.	Kliksberg
	Operasional pemerintah berbasis TIK pintar (mis. kelompok kerja lintas departemen untuk setiap bidang TIK; infrastruktur untuk pendidikan dan pelatihan; strategi kelembagaan <i>procurement</i>).	Key and We
	Evolusi istilah <i>smart government</i> menjadi <i>smart governance</i> dalam usaha pemerintah mengatasi lingkungan yang kompleks dan tidak menentu serta untuk mencapai daya tahan.	Scholl and Scholl
	Percampuran kreatif antara teknologi baru dan inovasi di sektor publik.	Gil-Garcia, Helbig, and Ojo
	<i>Smart government</i> adalah langkah selanjutnya dari <i>e-government</i> .	Anthopoulos, Reddick, Mavridis, and Giannakidou
	<i>Smart government</i> adalah langkah selanjutnya dari <i>open government</i> .	Jiménez, et. al.
	Prinsip, faktor dan kapasitas yang membentuk tata kelola pemerintahan yang dapat mengatasi kondisi dan keperluan mendesak dari masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge society</i>).	Key and We
	Sebuah dimensi <i>smart city</i> yang mengukur kinerja <i>smart government</i> lokal (daerah).	Giffinger and Gudrun
<i>Smart Governance</i>	Fasilitator ekonomi lokal melalui pembuatan kebijakan untuk pembentukan bisnis/usaha baru.	Scholl and Scholl
	Tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk mengelola prakarsa/inisiatif <i>smart city</i> .	Alawadhi
	<i>Smart city</i> adalah area praktek untuk <i>smart government</i> .	Nam and Pardo
	<i>Smart government</i> merupakan sumber dari pelayanan publik pintar, dari pemerintah kota dan keterlibatan publik (masyarakat).	Anthopoulos, Reddick, Mavridis, and Giannakidou
<i>Smart Government dan Smart City</i>	<i>Smart city</i> adalah suatu area untuk pembangunan <i>smart government</i> .	Anthopoulos and Reddick
	<i>Smart government</i> berurusan dengan pemerintahan <i>smart city</i> , yang mengelola dan menerapkan kebijakan dengan mengangkat/meningkatkan TIK dan institusi serta secara aktif terlibat dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.	Scholl and Scholl

Sumber: Anthopoulos and Reddick (2016)

Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa *smart government* tidak bersinonim dengan *smart city*, namun merupakan istilah lebih luas yang menggambarkan langkah selanjutnya dari transformasi pemerintahan, sedangkan *smart city* dapat dianggap sebagai suatu area dalam istilah menyeluruh dari *smart government*. *Smart government* berkomplementer dan saling berhubungan dengan *smart city*. *Smart government* tidak mengesampingkan *smart city*, namun *smart government* memberi arah pembangunan *smart city*, seraya menggunakan *smart city* sebagai area praktek (mis. kolaborasi dan pengujian layanan bersama) (Anthopoulos and Reddick, 2016).

Dimensi *Smart Government*

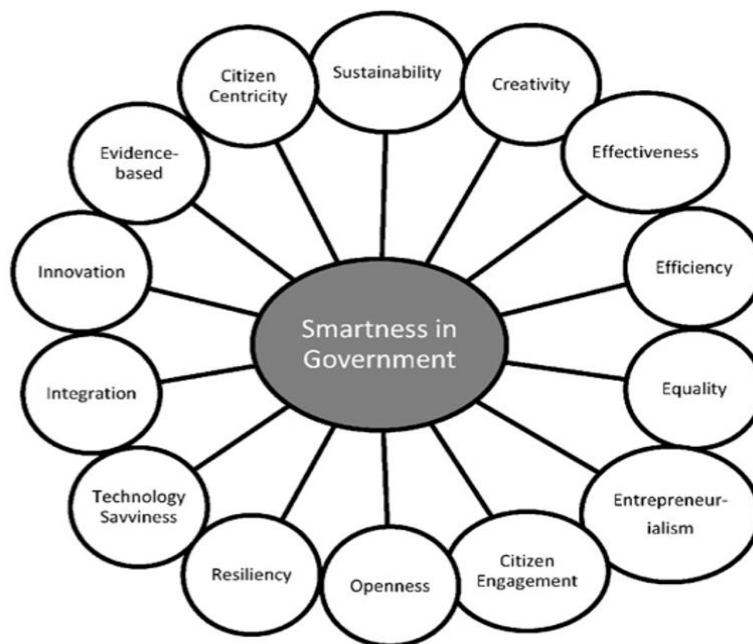
Gil-Garcia, et. al. (2016) mengkaji dimensi *smartness* (pintar) dalam pemerintahan dan menghasilkan 14 dimensi (*smart government*), yaitu: integrasi (*integration*), inovasi (*innovation*), berbasis bukti (*evidence-based*), keterpusatan pada warga (*citizen centricity*), keberlanjutan (*sustainability*), kreativitas (*creativity*), efektifitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), persamaan (*equality*), kewirausahaan (*entrepreneurialism*), keterlibatan warga (*citizen engagement*), keterbukaan (*openness*), ketahanan (*resiliency*), dan kecerdasan teknologi (*technology savviness*).

1. Integrasi (*integration*) merupakan dimensi kunci dalam mengkarakteristik konsep *smartness* (pintar) dalam pemerintahan. Integrasi dan berbagi informasi antar organisasi dalam bagian-bagian pemerintah memberikan perbaikan dalam hal: komunikasi, tanggapan (respon), koordinasi, dan penyediaan layanan untuk warga masyarakat, menjadikan pemerintah lebih “pintar”.
2. Inovasi (*innovation*) memungkinkan suatu pemerintahan menjadi lebih pintar dengan terus-menerus menggabungkan cara-cara terbaru dan yang telah diperbaiki dalam memberikan layanan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melalui dimensi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based*), pengambilan keputusan berdasarkan data dan penggunaan data secara intensif, melalui penginderaan, pengukuran canggih, dan aplikasi terintegrasi memungkinkan pemerintah membuat keputusan yang lebih berdasar, dan memperbaiki efektifitas kebijakan dan program publik.

4. Keterpusatan warga (*citizen centricity*) berarti pemerintah mengetahui keinginan warga dan menggunakan TIK untuk memenuhi kebutuhan warga serta menyediakan informasi dan layanan yang terpersonalisasi.
5. Keberlanjutan (*sustainability*) mengacu kepada implikasi ekologis pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan kota, kabupaten, dan provinsi yang cepat dalam jangka panjang, serta perbaikan kualitas hidup generasi selanjutnya.
6. Kreativitas (*creativity*) pemerintah dalam hal intervensi dapat dilakukan, dan pemerintah juga dapat mengembangkan lingkungan untuk mendorong kreativitas, dengan demikian dapat mengembangkan keberagaman budaya dari warga “pintar”.
7. Efektifitas (*effectiveness*) melebihi pelayanan, dapat meningkatkan kualitas hidup warga melalui kebijakan yang dapat menjangkau target populasi, serta memecahkan masalah-masalah kompleks.
8. Dengan efisiensi (*efficiency*) dapat menyediakan nilai tambah kepada warga dengan sumber daya lebih sedikit, hal tersebut sangat penting dan merupakan suatu langkah menuju *smart government*.
9. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup untuk semua, pemerintah menghadapi ketidakadilan di berbagai bidang. Penggunaan TIK, data, dan strategi yang sesuai dapat membantu mengurangi pengasingan sosial dan memajukan keadilan/persamaan (*equality*) sosial.
10. Fokus yang lebih luas dalam hal integrasi berbasis pengetahuan dan pembangunan ekonomi berorientasi inovasi dapat memajukan lingkungan bisnis yang sehat (*entrepreneurialism*) serta dapat meningkatkan daya tarik kota, kabupaten, maupun provinsi.
11. Melalui keterlibatan warga (*citizen engagement*), menyediakan komunikasi dua arah dan memungkinkan kolaborasi dan partisipasi, serta memelihara hubungan yang lebih kuat dan cerdas antara warga dan pemerintah
12. Ketika bersifat terbuka (*openness*) maka pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, dengan demikian menjadi pemerintahan yang lebih pintar untuk warga masyarakat, bisnis/usaha, dan pemangku kepentingan lain. Pemerintah juga dapat menggunakan informasi beragam melalui cara yang lebih pintar.
13. Pemerintah daerah, regional, dan pusat diharapkan untuk dapat memberikan tanggapan kepada warga masyarakat jika terjadi hal darurat dan bencana. Pemerintah pintar harus dapat

pulih secara cepat dan membangun kembali operasionalnya, termasuk dalam hal informasi dan layanan untuk warga masyarakat, kalangan usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

14. Kecerdasan teknologi (*technology savviness*) menyediakan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat memilih, mengimplementasi, dan menggunakan perangkat, strategi, dan aplikasi teknologi informasi untuk membuat pemerintah lebih pintar.



Gambar 3. Dimensi *Smart Government* (Gil-Garcia, et. al., 2016).

Gil-Garcia, et. al. (2016) menyatakan bahwa konsep pintar dalam pemerintah dapat dikonseptualisasi sebagai fenomena multidimensi, yang setiap dimensinya dapat dianggap sangat penting. Kombinasi dimensi berbeda dapat menghasilkan hasil yang serupa, dan kemungkinan kombinasi serupa dari beberapa dimensi dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Tidak ada cara untuk menjadi pintar atau lebih pintar, pemerintah dapat memiliki beberapa kombinasi dimensi, namun masih dapat dianggap sebagai *smart government*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Peneliti tidak mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Peneliti melakukan

pendalaman isu spesifik yang dipilih secara holistik dari setiap permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian.

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Menurut Mantra (Mantra, 2004:121), "Sampling *purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian". Informan yang dipilih dengan teknik *purposive* sampling didasarkan atas pertimbangan :

1. Informan tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut.
2. Ketersediaan informan untuk diwawancarai oleh penulis.
3. Kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan dengan latar belakang penelitian.

Informan dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Pemkot Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banjar.
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar.
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar.
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar.
5.	Kepala Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Kepala Perindag Kabupaten Purwakarta, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Banjar.
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Banjar.
7.	Masyarakat di enam kabupaten/kota yang menjadi sampel lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer untuk penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu menggali informasi dari para informan dengan menggunakan panduan dan pedoman wawancara. Pengumpulan data primer berupa wawancara ini hanya dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih untuk melakukan penelitian kualitatif, khususnya pelaksana penelitian ini. Teknik *Focus Group Discussion (FGD)* dilakukan untuk mengonfirmasi data (sekunder dan primer) dari hasil analisis data lapangan dan merumuskan konsep *Jabar Smart Province* / kesiapan daerah menuju *Jabar Smart Province*. Informan yang diundang dalam FGD akan dijelaskan dalam panduan untuk FGD tersendiri.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran sumber di perpustakaan, dokumen, kliping media, dan sejenis yang terkait dengan permasalahan penelitian. Observasi, yakni melakukan pengamatan terhadap keberadaan infrastruktur TIK, SDM, dan juga observasi di wilayah makro, misalnya pencatatan tentang kebijakan di pemerintah kota yang berkaitan dengan program *Jabar Smart Province*. Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk mendukung kelengkapan data penelitian.

Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data kualitatif baik yang sekunder dan data primer yang terkumpul dari seluruh lokasi penelitian dilakukan koding data, klasifikasi data sesuai dengan karakteristik data, dan indikatornya masing masing untuk diintegrasikan. Pengintegrasian data kualitatif bukan dimaksud untuk generalisasi data, tetapi memetakan isu yang berkaitan dengan kebijakan/program *Jabar Smart Province* dan kesiapan daerah menuju *Jabar Smart Province*

Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilihat dari tingkat intensitas dan beban kerja yang dikategorikan menjadi tiga yakni besar, sedang, dan kecil. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten dan kota, di mana ada 13 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori besar, 12 Kabupaten dan kota yang masuk

kategori sedang, dan 2 (dua) kabupaten dan kota yang masuk kategori kecil. Lokasi penelitian terpilih adalah:

Tabel 4. Lokasi Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kategori
1.	Kabupaten Cirebon	Besar
2.	Kabupaten Garut	Besar
3.	Kota Bogor	Besar
4.	Kabupaten Purwakarta	Sedang
5.	Kota Cimahi	Sedang
6.	Kota Banjar	Kecil

Alasan pengambilan lokasi tersebut adalah bahwa Program *Jabar Smart Province* yang akan diluncurkan tersebut merupakan salah satu urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dan sekaligus untuk mengetahui kesiapan dari daerah dalam menyongsong Program *Jabar Smart Province* yang dilihat dari kategori besar, sedang, dan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthopoulos and Reddick. (2016). *Smart City and Smart Government: Synonymous or Complementary?*. International World Wide Web Conference Committee (IW3C2), DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/2872518.2888615>
- Abdurrahman, Muhammad Sufyan. (2016). *Jabar Bergegas Menjadi Smart Province*. Tersedia dalam <http://tekno.liputan6.com/read/2672914/jabar-bergegas-menjadi-smart-province>, diakses tanggal 24 Januari 2017, jam 11.00 WIB.
- Gil-Garcia, et. al. (2016). *Conceptualizing Smartness In Government: An Integrative And Multi-Dimensional View*. Article in Government Information Quarterly · April 2016, DOI: 10.1016/j.giq.2016.03.002.
- Mantra, Ida Bagoes. (2000). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Averroes Press.
- Salsabila, Shabrina. (2015). Analisis QFD Pada Layanan Customer Representative Mobile Community Access Point (M-CAP) Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/101916/jurnal_eproc/analisis-qfd-pada-layanan-customer-representative-mobile-community-access-point-m-cap-dinas-kominfo-provinsi-jawa-barat.pdf, 24 Januari 2017
- Badan Litbang SDM, Kominfo. (2012). Laporan Akhir Maturity SmartCity.
- Badan Litbang SDM, Kominfo. (2015). Buku Putih TIK.